

**Pendidikan Politik: Kekerasan Komunal Masa Transisi Orde Baru
(Analisis Kritis Gery Van Klinken terhadap Konflik di Indonesia)**

Rafiudin

Program Studi Manajemen Informatika
Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al-Khairiyah Cilegon
Jalan H. Enggus Arja No. 1 Link. Citangkil Cilegon 42441
Email: averus.rafi@gmail.com

Abstrak

Pendidikan dianggap penting karena memiliki nilai investasi yang tinggi untuk kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kualitas pendidikan yang baik dari segala bidang, utamanya di bidang politik. Gery Van Klinken mengungkapkan sebuah peristiwa buruk bangsa Indonesia di masa lalu yang menggambarkan keterpurukan dari pendidikan politik di Negeri ini. Pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Emile Durkheim tidak akan pernah lepas dari social thing yang menjadi kajian khusus Gery dalam penelitiannya bahwa kekerasan komunal berakibat pada timbulnya kekerasan sosial yang sangat buruk. Pendidikan politik yang salah diadopsi oleh bangsa-bangsa di dunia menjadikan politik sebagai mutiara yang diperjualbelikan dan diperdagangkan di pasar yang pembelinya tidak mengetahui bentuk mutiara yang asli dan yang palsu sehingga butuh pendidikan khusus tentang mutiara. Agama Islam sebagai agama terbesar seolah tidak bisa melahirkan generasi yang pandai berpolitik serta pandai memilah-milah kepalsuan di balik politik yang sejatinya bersifat semu.

Kata Kunci: *Pendidikan, Social Thing, kekerasan Sosial*

Pendahuluan

Pendidikan menurut Emile Durkheim (Iriany, 2014: 62-63) berfungsi sebagai *baby sitting* yang bertugas agar masyarakat tidak ada yang berperilaku menyimpang. Sebuah kekerasan yang terjadi di negeri ini adalah akibat dari perilaku menyimpang para politikus yang rela mengorbankan masyarakat tidak berdosa untuk meraih sebuah kekuasaan yang didamba dan diharapkan kelanggengannya. Durkheim memandang bahwa pendidikan adalah *social thing*, di mana kegagalan di dunia pendidikan akan melahirkan kehancuran sosial.

Pengalaman Indonesia mengalami demokratisasi setelah rezim orde baru otoriter yang berakhir Tahun 1998. Rakyat Indonesia pada rezim tersebut mengalami berbagai macam tekanan politik yang bermuara pada kekekalan sang penguasa dalam memimpin Indonesia. Soeharto sebagai presiden terlama di Indonesia yang memegang kekuasaan penuh pada setiap lini kehidupan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat yang semu bagi sebagian orang dan berprestasi bagi sebagian yang lain.

Masa transisi menuju demokrasi tidak sedamai yang dibayangkan. Banyak terjadi pergulatan yang menelan jatuh korban tidak sedikit. Demokrasi harus dibayar dengan tangis air mata dan tidak sedikit aliran keringat dan darah. Demokrasi bukanlah sesuatu yang murah meriah tapi butuh pada usaha-usaha dan kerja keras yang disertai pengorbanan dalam segala hal. Kira-kira 10.000 menjadi korban akibat kekerasan *komunal* (antar etnis-agama). Jumlah yang tidak sedikit dalam kaca mata Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut perlu ditinjau sebagai pendidikan politik demi kedewasaan bangsa dalam berpolitik.

Buku Gery menganalisa secara komprehensif untuk pertama kalinya mengenai episode-episode kekerasan *komunal* berskala luas selama masa transisi *pasca* orde baru. Sebuah buku yang menggambarkan secara berkala dengan penuh ketelitian yang diusung semata-mata untuk menjadi pelajaran berharga dan juga renungan bangsa Indonesia agar tidak melupakan sejarah penebusan demokrasi yang sedemikian mahal.

Kekerasan *Komunal* yang diteliti oleh Gery adalah kekerasan yang terjadi pada Rentang waktu 1997–2002. Rentang waktu yang sangat singkat dalam hitungan tahun, namun berisi banyak kisah memilukan yang dialami anak bangsa di bumi nusantara yang

terkenal dengan cinta kasih. Dalam ungkapan sastra sunda yang penuh nilai filosofis dikenal dengan “silih asah, silih asih, dan silih asuh.” Gambaran lima tahun tersebut seolah mengubur popularitas pepatah yang sedemikian tersohor.

Demokratisasi dan *desentralisasi* (di wilayah-wilayah yang terjadi konflik) mendorong elit-elit kunci untuk bersaing demi kuasa politik dalam suasana panik. Pertarungan elit selalu menghadirkan korban-korban yang tidak sedikit sehingga kedewasaan para elit seolah lebih mutlak diutamakan ketimbang memikirkan bagaimana mereka harus berkuasa dan mencari cara-cara serta taktik yang otentik untuk mendudukkan mereka di kursi kekuasaan.

Elit-elit kunci melakukan dengan cara memobilisasi massa etnis dan agama. Menghilangkan ruang persaudaraan dan kekeluargaan dalam menghadapi problem-problem kenegaraan. Mobilisasi melahirkan konsekuensi logis akan jatuhnya korban di kedua belah pihak yang baik disadari ataupun tidak akan berujung pada penyesalan dan air mata. Sungguh tragis nasib bangsa Indonesia jika terus menerus dipimpin oleh para elit yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya. Kegagalan pendidikan politik bagi bangsa yang besar yang kekuasaannya hanya meliputi para elit.

Kejadian ini (kekerasan *komunal*) menunjukkan bahwa sering terjadi di negara dunia ketiga yang sedang dalam masa transisi kekuasaan. Lebih tepatnya transisi sistem dalam mencapai kekuasaan yang dianut oleh sebuah bangsa yang ingin lebih maju lagi dalam menentukan nasib dan masa depannya. Masa transisi tidak dapat dihindari oleh siapapun yang memang menghendaki perubahan dalam hidup. Usaha-usaha bangsa Indonesia dalam meminimalisasi sebuah korban adalah usaha-usaha yang paling *urgen* dalam menghadapi masa transisi. Kepentingan elit harus dibatasi oleh kepentingan bangsa yang jauh lebih besar sebagai tonggak berdirinya sebuah negara yang besar, makmur dan sejahtera.

Kajian Metodologi

Gery dalam bukunya mencoba menggali kekerasan *komunal* yang ada di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *contentious politics* (politik seteru) untuk mendalami proses-proses sosiologis di seputar kekerasan *komunal*. Buku yang ideal untuk

didiskusikan di kalangan akademisi dan elit politik bangsa Indonesia agar menjadi lebih bijaksana dalam menentukan sebuah kebijakan bagi kepentingan bangsa yang besar dan sebagai pendidikan politik.

Dilema demokrasi bangsa Indonesia, di satu sisi kran kebebasan terbuka di sisi lain banyak terjadi kekerasan *komunal* (bisa jadi) akibat dari kebebasan (yang kebablasan) tersebut. Demokrasi yang tidak terkendali akan melahirkan wilayah abu-abu yang sangat berbahaya dalam kelangsungan berbangsa dan bernegara. Demokrasi bisa saja dikendalikan oleh oknum dari putra bangsa yang ingin menjual negara ini kepada bangsa lain. Itulah resiko terbesar dari praktik demokrasi yang sedang dijalani oleh bangsa Indonesia.

Kekerasan *komunal* di bumi pertiwi ini bermula dari Sambas, Kalimantan Barat konflik antar suku Melayu dan Madura di kota kecil Sanggau Ledo. Kekerasan demi kekerasan dipotret oleh Gery dengan sajian yang sangat mencengangkan bangsa Indonesia di tengah-tengah kebanggaannya yang merasa sukses menjalankan demokrasi.

Teori *Contentious Politics*

Teori *Contentious Politics* merupakan Pengembangan dari Teori *Social Movement*. Ciri-ciri Gerakan Sosial (*social movement*). Berdasarkan definisi *The Blackwell Companion to Social Movement* gerakan sosial memiliki ciri antara lain: Tindakan kolektif (*collective action*), *Change-oriented goals* (tujuan berorientasi kepada perubahan), *Some collective action is non institutional* (beberapa tindakan kolektif tidak terlembaga (*non-institutional*), *Some degree of organization* (beberapa berbentuk organisasi), dan *Some temporal continuity*, beberapa berkelanjutan sampai tingkat tertentu.

Gery menggunakan perspektif *contentious politics* dari buku *Dynamics of Contention* karangan Doug McAdam, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly (2001). Dalam Teori “Politik Seteru” (*contentious politics*) terdapat Lima Proses Kunci yang diurai oleh Gery, yaitu: a) *Identity Formation* (Pembentukan Identitas) bagaimana identitas bersama (*bounded identity*) berkembang dalam sebuah kelompok? b) *Scale Shift /Escalation* (eskalasi) bagaimana sebuah konflik kecil mengalami eskalasi sehingga melibatkan aktor-aktor yang lebih banyak? c) *Polarization* (polarisasi) bagaimana ruang politik antara pihak-pihak yang berseteru meluas ketika para peserta itu saling menjauh

dan menggeser ke arah titik-titik ekstrim? d) *Mobilization* (mobilisasi) bagaimana orang yang biasanya bersikap acuh tak acuh dapat digerakkan ke jalan? e) *Actor Constitution* (pembentukan aktor) bagaimana sebuah kelompok yang sebelumnya tidak terorganisir atau apolitis berubah menjadi sebuah aktor politik tunggal?

Dengan pisau analisis politik seteru Gery berupaya mengungkap segala bentuk kekerasan yang terjadi pada masa transisi orde baru. Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia diungkap secara komprehensif sehingga melahirkan sebuah sudut pandang yang lebih jernih ketika menghadapi persoalan serupa di masa yang akan datang. Gambaran Gery tidak sebatas mengungkap fakta-fakta yang terjadi pada masa itu, namun juga berupaya mengungkap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di balik fakta-fakta tersebut.

Gery menunjukkan beberapa bukti empiris bagaimana sebuah kekerasan berasal dan mengungkap akibat yang dialami pasca terjadinya kekerasan tersebut sebagai sebuah nasihat bagi bangsa Indonesia bahwa betapa mahal harga yang harus dibayar baik materi maupun moral. Bangsa Indonesia perlu untuk mengkalkulasi untung rugi dari sebuah tragedi kekerasan apalagi yang dilakukan secara komunal.

Menyoal Masalah Konflik dan Kekerasan

Konflik bisa dipicu karena adanya peristiwa seperti perebutan kekuasaan, sengketa ekonomi, atau kasus pembunuhan kemudian bereskalasi dari satu kondisi ke kondisi yang lebih besar dampaknya bagi kehidupan bangsa. Konflik yang timbul di Indonesia terakumulasi dari konflik-konflik kecil yang terpendam dan merajut menjadi sebuah konflik besar yang tak terkendalikan karena hampir terjadi pada saat yang bersamaan. Ada juga faktor lain yang lebih mendasar, yaitu akar konflik. Akar konflik biasanya tidak terlihat di permukaan, bisa berupa ketidakadilan, diskriminasi, korupsi, dan lain-lain.

Konflik pada dasarnya sesuatu yang lumrah terjadi pada setiap kelompok manusia yang hidup berdampingan. Sangat sulit bagi seseorang dalam tindakannya selalu diterima kelompok lain apalagi didasari oleh perbedaan seperti agama, ras, suku, dsb. Namun, sikap tenggang rasa dan hidup rukun telah berabad-abad menjadi dasar untuk hidup

bersama di bumi Nusantara sehingga terkesan tidak etis jika hal tersebut menjadi sebuah pemicu utama timbulnya konflik yang besar.

Gery menggambarkan lima tipe kekerasan dalam bukunya, yaitu: a. *Secessionist Violence*: Kekerasan (akibat dari keinginan untuk) memisahkan diri. Sejak kemerdekaan Indonesia tercapai pada tahun 1945 masalah ini juga langsung lahir karena ada sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merasa lebih berhak dibandingkan dengan wilayah lain dalam hal kesejahteraan. Konflik di Papua, Aceh, dan Timor Leste adalah segelintir konflik yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. b. *Large-scale communal violence*: kekerasan *komunal* skala besar (ini yang jadi subjek bahasan Buku Gerry V Klinken). Kekerasan dalam bentuk ini terjadi begitu dramatis di Indonesia karena hampir setiap tragedinya menampilkan sosok *heroisme* tersendiri sehingga perlu dicermati dari berbagai sudut pandang yang lebih arif bijaksana. Kekerasan yang menjadi sorotan Gery ini menjadi sebuah kajian bersama dalam membendung kemunculannya pada episode yang akan datang. c. *Localized communal riots*: huru hara *komunal* lokal (Mei 1998), anti Cina 1996-1997, Tasikmalaya, Situbondo, Makassar. Meskipun huru hara yang terjadi di negeri ini tidak sampai melahirkan disintegrasi bangsa namun bukanlah persoalan yang sepele. Huru hara dapat menimbulkan keresahan dan trauma berkepanjangan sehingga sangat merugikan perkembangan kepribadian putra putri terbaik bangsa. d. *Social violence*: kekerasan sosial = *Vigilantisme* (main hakim sendiri), perselisihan antar desa, peristiwa pembunuhan terhadap yang tertuduh tukang santet di Jawa Timur (1998). Bangsa Indonesia yang melek hukum tidaklah sedikit namun kepercayaan bangsa terhadap aparat hukum seringkali mebutakan mata hati mereka ketika menghadapi persoalan sosial di lingkungan terdekat. Perlu adanya usaha-usaha dalam bentuk pendidikan hukum agar bangsa ini lebih dewasa dalam memahami persoalan hukum. e. *Terrorist violence*: kekerasan terorisme. Bentuk aktualisasi diri yang salah dari sebuah ajaran agama dapat melahirkan teroris-teroris muda yang militan. Legitimasi adanya teroris menjadi persoalan sendiri di Indonesia. Sudah banyak jatuh korban yang tidak berdosa gara-gara terorisme, bahkan isunyunpun sungguh membuat tidak nyaman dalam hidup berbangsa dan bernegara (Klinken, 2007: 7).

Gery V Klinken (2007: 7) menyimpulkan bahwa pada akhirnya kekerasan hanyalah sebagian dari politik yang normal. *“The violence was a part of normal politics”*. Kekerasan lahir dari adanya kondisi politik yang tidak kondusif dan untuk mengakhirinya diperlukan cara-cara yang ideal dalam menstabilkan suhu politik dan kondisinya secara cepat dan tepat. Di Indonesia menurut Fachry Ali digunakan sistem politik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam sebagai pemberi legitimasi atau disebut oleh Donald Eugene Smith sebagai struktur *religio* politik tradisional (Thaba, 1996: 138).

Masyarakat yang memahami kondisi politik dan para elit harus bahu membahu dalam menstabilkan kondisi tersebut, dimana kekerasan tidak akan berakhir sebelum adanya kondisi yang normal. Masa transisi adalah masa yang paling riskan terjadinya konflik multidimensi bahkan keutuhan negara jadi taruhannya. Semua unsur atau elemen masyarakat yang pesimis menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi tanpa memikirkan nasib sesama anak bangsa.

Analisis Gery Van Klinken

Menurut Gery *“The Indonesian events had several of these characteristics. The crowds of people who attacked Madurese settlers in Kalimantan at various times, the massed fighters in the streets of Ambon or the villages of Central Sulawesi and North Maluku – these were certainly examples of collective action”* (Klinken, 2007: 7). Indonesia sebagai sebuah bangsa memiliki karakteristik sendiri pada tiap pribadi suku bangsanya. Kalimantan dan Madura memiliki karakteristik yang berbeda sehingga dianggap rawan terjadi konflik antara dua suku tersebut. Demikian halnya suku Ambon dan Poso pasti juga rawan terjadi konflik yang melahirkan kekerasan komunal.

Salah satu ciri kekerasan komunal di Indonesia: Banyak aktor yang bermain dan berinteraksi dalam sebuah konflik dan juga adanya Peran elit lokal, tokoh partai politik, gereja-gereja, organisasi mesjid, LSM membantu mengorganisir masa di jalanan. *“Exactly how locally significant elites and their political parties, churches, mosque organizations, NGOs (non-government organizations) and pressure groups helped organize the crowds on the streets is the burden of thisbook* (Klinken, 2007: 8).”

Berdasarkan teori yang digunakan oleh Gery, diperoleh beberapa penemuan yang diformulasikan dalam sub bab yang menggambarkan kondisi Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2002, sebagai berikut:

Dalam **Chapter 4: Identity Formation** (Pembentukan Identitas). Pada bab ini diulas, bagaimana identitas bersama (*bounded identity*) berkembang dalam sebuah kelompok? Sebagai contoh adalah di Kalimantan Barat (Sambas) yang terjadi pada tahun 1999, yaitu terjadi konflik antara etnis Melayu dan Madura. Kejadian tersebut sangat menyayat hati bangsa Indonesia pada umumnya. Sebab sangat miris jika dulu ketika melawan penjajah mereka bersatu padu, bahu membahu mengusir penjajah, namun setelah para penjajah pergi justru antara mereka sendiri menjadi musuh. Kejadian tersebut banyak menelan korban.

Dalam **Chapter 5: Escalation** (eskalasi). Pada bab ini diulas, bagaimana sebuah konflik kecil mengalami eskalasi sehingga melibatkan aktor-aktor yang lebih banyak? Sebagai contoh adalah di Poso (Sulawesi Tengah) Muslim-Kristen. Perseteruan dua kelompok agama tersebut melibatkan banyak aktor di belakangnya. Sebagai seorang muslim para cendekiawan muslim juga ikut melibatkan diri dan demikian halnya yang terjadi pada penganut agama kristen. Hal tersebut berujung pada penghinaan ajaran agama kelompok lawan. Sebuah fakta bahwa para teolog besar seperti Thomas Aquinas juga melegitimasi kekerasan dalam agama secara *teologis* (Beuken dkk, 2003: 241).

Ungkapan-ungkapan keras juga kerap terjadi di kalangan Islam dengan konsep jihad yang sudah tidak dapat dibantah lagi legitimasinya. Doktrin tokoh-tokoh agama seperti Hasan Al-Bana yang mengatakan bahwa seorang mukmin memiliki tugas untuk memimpin dunia dan membimbing manusia menuju sistem dan ajaran Islam, tanpa Islam manusia tidak akan mendapatkan kebahagiaan (Al-Ghazali, 2001: 43).

Edward seorang ahli sejarah Islam populer menggambarkan bagaimana Islam sebagai sistem pemerintahan juga tidak kalah memiliki kekurangan, setelah empat khalifah pertama yang diberi gelar khulafaurrasyidin wafat, kebanyakan khalifah yang menggantikan mereka tidak memiliki kecakapan ruhani yang memadai, yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memamerkan kekuatan yang kejam tak berpikemanusiaan atau untuk diwariskan kepada keturunannya (Mortimer, 1984: 27).

Dalam *Chapter 7: Polarization* (polarisasi). Pada bab ini diulas, bagaimana ruang politik antara pihak-pihak yang berseteru meluas ketika para peserta itu saling menjauh dan menggeser ke arah titik-titik ekstrim? Sebagaimana yang terjadi di Maluku Utara. Kelompok-kelompok yang berseteru satu sama lain saling mencari dukungan kepada kelompoknya yang senasib, seetnis, atau seagama. Dukungan-dukungan tersebut menjadikan sebuah persetuan kecil menjadi lebih besar secara berkala.

Dalam *Chapter 6: Mobilization* (mobilisasi). Dalam bab ini diulas secara signifikan, bagaimana orang yang biasanya bersikap acuh tak acuh dapat digerakan ke jalan? Setiap orang memiliki bara api di dadanya meskipun terlihat diam dan seolah acuh, nyatanya kejadian seperti di Ambon (Maluku) begitu mencengangkan semua kalangan, karena di wilayah yang tergolong adem mayem dan tentram serta masyarakatnya dinilai acuh terhadap hal-hal yang berbau sara, jika disulut dengan api yang membara maka terjadilah pertumpahan darah yang menelan banyak korban.

Dalam *Chapter 8: Actor Constitution* (pembentukan aktor). Dalam bab ini diulas, bagaimana sebuah kelompok yang sebelumnya tidak terorganisir atau apolitis berubah menjadi sebuah aktor politik tunggal? Sebagai contoh adalah konflik yang terjadi di Kalimantan Tengah (Sampit) 2001 antara etnis Dayak dan Madura.

Persamaan dan perbedaan kekerasan komunal di lima tempat berbeda: Konflik di Kalimantan Barat (Sambas) dan Kalimantan Tengah (Sampit) memiliki kesamaan yaitu persoalan *ethnic identity*. Di Kalimantan Barat (Sambas) 1999 konflik antara etnis Melayu dan Madura menelan banyak korban dari kedua belah pihak. Perseteruan yang tak kunjung padam melahirkan banyak luka fisik dan batin, demikian halnya di Kalimantan Tengah (Sampit) 2001 antara etnis Dayak dan Madura. Dua etnis tersebut bertempur seolah-olah mereka bukan lagi satu anak bangsa, sungguh mengerikan jika disaksikan pemandangan para korban yang sudah di luar pri kemanusiaan.

Konflik di Maluku (Ambon), Sulawesi Tengah (Poso), dan Maluku Utara memiliki kesamaan yaitu persoalan *religious identity*. Agama sebagai jalan kedamaian dan kebaikan sudah tidak diindahkan lagi. Masing-masing penganutnya sudah gelap mata dalam menyikapi perbedaan agama di sekelilingnya. Ajaran agama yang penuh mengajarkan kebaikan seolah telah sirna dari kitab sucinya sehingga kebencian

menjadi satu-satunya ajaran perilaku yang tersisa. Hal tersebut seolah menyepakati perkataan Merleau Ponty bahwa kekerasan agama melekat dalam watak agama (Beuken dkk, 2003: 241).

Konflik di Kalimantan Barat (Sambas) antara Melayu dan Madura dan Kalimantan Tengah (Sampit) antara Dayak dan Madura secara kuantitas pelaku tidak berimbang. Sering terjadi konflik karena adanya istilah mayoritas dan minoritas. Kelompok-kelompok mayoritas yang tidak memahami kedudukannya sebagai pengayom merasa jumawa dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menindas dan mengintimidasi yang melahirkan perlawanan dari kelompok minoritas yang juga memberi perlawanan dengan sengitnya.

Kelompok mayoritas merasa lebih berkuasa sehingga ketika kekuasaan itu tidak terkendalikan maka kekuasaan menjadi sarat untuk mencapai keuntungan sepihak, baik secara pribadi maupun kelompok pendukung. Penguasa memiliki kemampuan memainkan strategi untuk melanggengkan kekuasaan dan peranan sosial yang paling vital dalam suatu masyarakat. Terutama jika masyarakat yang dijadikan objek adalah masyarakat primitif. Jika para penguasa memiliki kelimpahan harta dihadapan dengan kelompok yang primitif. Penguasa yang banyak modal dihadapkan dengan kelompok yang butuh modal maka akan terjadi ketergantungan yang mendatangkan sikap kepatuhan (Martin, 1995: 98). Sedangkan jika terjadi perlawanan dari pihak minoritas maka tidak menutup kemungkinan terjadi kekerasan dari pihak-pihak yang merasa lebih berkuasa.

Konflik di Maluku (Ambon), Sulawesi Tengah (Poso), dan Maluku Utara antara Muslim dan Kristen mirip perang sipil karena secara kuantitas cukup berimbang. Kedua kelompok merasa cukup kuat untuk bisa mengendalikan kelompok lain sehingga jelas dan pasti menimbulkan konflik yang tidak sedikit menelan banyak korban.

Kesimpulan

Metodologi Gery dalam mengurai sebuah kekerasan yang terjadi di Indonesia menggunakan teori *contentious politics* yang terdiri dari lima kunci, yaitu *Identity*

Formation (Pembentukan Identitas), *Scale Shift /Escalation* (eskalasi), *Polarization* (polarisasi), *Mobilization* (mobilisasi), dan *Actor Constitution* (pembentukan aktor)

Gery menggambarkan lima tipe kekerasan dalam bukunya, yaitu: *Secessionist Violence* (Kekerasan akibat dari keinginan untuk memisahkan diri), *Large-scale communal violence* (kekerasan komunal skala besar), *Localized communal riots* (huru hara komunal lokal), *Social violence* (kekerasan sosial), dan *Terrorist violence* (kekerasan terorisme).

Salah satu ciri terpenting dari Kekerasan *Komunal* di Indonesia adalah adanya banyak aktor yang bermain dan berinteraksi dalam sebuah konflik dan juga adanya Peran elit lokal, tokoh partai politik, gereja-gereja, organisasi mesjid, LSM membantu mengorganisir masa di jalanan.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Abdul Hamid (2001) *Pilar-pilar Kebangkitan Umat, Telaah Ilmiah terhadap Konsep Pembaruan Hasan Al-Bana*, Penerjemah, Khozin Abu Faqih dan Fachruddin, Penerbit: Al-I'tishom Cahaya Umat
- Beuken, Wim., dkk (2003) *Agama Sebagai Sumber Kekerasan*, Penerjemah: Imam Baehaqie, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Iriany, Ieke Sartika (2014) *Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Revitalisasi Jati Diri Bangsa*, Jurnal Pendidikan Universitas Garut, Vol.8, No.1
- Klinken, Gery Van (2007) *Communal Violence and Democratization in Indonesia: small town wars*, London and New York, NY: Routledge Contemporary
- Martin, Roderick (1995) *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Press
- Mortimer, Edward (1984) *Islam dan Kekuasaan*, Penerjemah: Enna Hadi dan Rahmani Astuti, Penerbit: Mizan
- Thaba, Abdul Aziz (1996) *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press